

PENGEMBANGAN KELOMPOK P3A Mendukung Produksi Padi Lahan Rawa Pasang Surut

Yanti Rina D. dan Muhammad Alwi

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Jl. Kebun Karet, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara,

Kalimantan Selatan 70712, Tlp. 08125109941

Email: tuha13@yahoo.co.id

RINGKASAN

Pengelolaan air merupakan kunci sukses berhasilnya usahatani padi di lahan rawa pasang surut. Semakin baik kondisi tata air semakin mudah pengembangan usahatani. Tidak berfungsinya jaringan tata air menyebabkan tidak terdistribusinya air dengan baik, hal ini disebabkan peran kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) belum berfungsi optimal. Pembentukan P3A pada awalnya untuk merespons proyek bantuan pemerintah sehingga belum didasari atas kebutuhan petani. Kelembagaan P3A yang mandiri dapat mengelola air dengan baik sehingga produksi dapat meningkat. Strategi pengembangan kelompok P3A di lahan rawa pasang surut, antara lain (a) mengidentifikasi para pelaku yang terlibat dalam pengembangan kelompok, (b) melakukan dialog dengan para pelaku tentang format kelembagaan P3A yang akan dibentuk, (c) mendorong para pelaku untuk membentuk kelembagaan P3A yang sesuai dengan format yang sudah disepakati, (d) melakukan peningkatan kapasitas para pengurus kelembagaan kelompok P3A untuk menyusun dan menetapkan rencana kerja, (e) melakukan peningkatan dukungan penyuluhan oleh PPL dan Juru Air, (f) meningkatkan kapasitas anggota kelompok P3A, (g) meningkatkan partisipasi anggota kelompok P3A dalam kelompok, dan (h) meningkatkan keterlibatan kelompok P3A dengan pihak luar.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan air merupakan kunci sukses dalam usahatani padi di lahan rawa pasang surut. Untuk mendukung peningkatan produksi padi di lahan rawa pasang surut diperlukan pengelolaan air yang tepat karena (1) ketersediaan air dan lahan yang semakin terbatas, dan (2) adanya kerusakan infrastruktur jaringan irigasi di tingkat usahatani dan sering

terjadinya anomali iklim ekstrem yang menyebabkan bencana kekeringan dan kebanjiran.

Sistem tata air di lahan pasang surut terdiri dari sistem tata air makro dan mikro. Sistem tata air makro pemeliharaannya dilakukan oleh pemerintah, sedangkan tata air mikro menjadi tanggung jawab petani. Petani sering menganggap bahwa pemeliharaan jaringan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, hampir semua jaringan tersier tak terpelihara dengan baik, sehingga tidak berfungsi optimal yang berakibat pada menurunnya kualitas lahan dan berdampak pada penurunan produktivitas lahan. Degradasi jaringan tata air mikro disebabkan oleh: (a) tidak berfungsinya kelompok P3A, (b) tidak memiliki dana, (c) tidak adanya rasa memiliki dan membutuhkan jaringan tata air karena padi yang ditanam padi lokal (adaptif), dan (d) kekompakan yang menurun akibat beban iuran yang tidak merata (tidak sesuai dengan luas kepemilikan lahan).

Terpeliharanya jaringan tata air sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan yang menanganinya. Jadi, sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan air irigasi, yakni Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi. Kebijakan tersebut memuat lima isi pokok meliputi: (a) Redefinisi tugas, kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, (b) Pemberdayaan P3A, (c) Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada P3A, (d) Pembayaran OP Jaringan irigasi melalui (IPAIR), dan (e) Keberlanjutan sistem irigasi. Selanjutnya, dalam rangka pembinaan kelompok P3A, maka pemerintah mengeluarkan INPRES No. 2 Tahun 1984 yang pada dasarnya memberikan arah kepada seluruh instansi terkait untuk membimbing organisasi petani yang ada dalam pengembangan usaha pertanian. Kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk organisasi petani yang menangani pengelolaan air irigasi disebut P3A. P3A dapat disebut suatu kelompok berdasarkan hamparan yang dikuatkan oleh terbitnya Permentan No. 79/Permentan/07.140/12/2012 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan P3A. Ruang lingkup Permentan tersebut meliputi pembentukan, pembinaan, dan Pemberdayaan P3A, sehingga diperlukan langkah-langkah dan kegiatan dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian P3A dalam upaya peningkatan produksi pertanian.

Pembentukan P3A sebagian besar pada awalnya bersifat keproyekan saja, sehingga tidak jarang hanya sebatas papan nama. Kegiatan ini hendaknya memerhatikan kelembagaan lokal, sehingga dapat berlanjut

seperti halnya kelembagaan subak di Bali. Lembaga P3A berfungsi untuk: (1) Wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat serta membuat keputusan guna memecahkan masalah yang dihadapi petani, (2) Memberikan pelayanan kepada para petani untuk pembagian dan pemberian irigasi secara adil dan merata, (3) Melakukan operasi pemeliharaan, pengembangan jaringan irigasi dan tersier, (4) Mengatur iuran para anggota berupa uang, hasil panen, dan pemeliharaan jaringan tersier serta usaha pengembangan organisasi (Permen PU No. 33 Tahun 2007).

Pengelolaan air pada tingkat tersier akan berjalan baik jika kelembagaan pengelolaan air (P3A) berfungsi dengan baik. Umumnya keberadaan kelompok P3A di lahan rawa pasang surut belum berfungsi maksimal, disebabkan karena kurangnya pembinaan oleh instansi terkait dan masih rendahnya kesadaran dan tanggung jawab petani terhadap pemeliharaan fasilitas jaringan irigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok P3A di lahan rawa pasang surut umumnya belum mandiri, sehingga dalam melakukan perannya belum efektif. Dinamika kelompok P3A di lahan rawa pasang surut berada pada tahap sedang, sehingga peningkatan dinamikanya dapat dilakukan melalui pembinaan pada pemeliharaan dan pengembangan kelompok. Persepsi petani terhadap manfaat kelembagaan P3A positif (Rina 2012). Besar kecilnya pemanfaatan kelompok P3A di lahan rawa pasang surut ditentukan oleh aktif tidaknya kelompok tani/gapoktan dalam menerapkan teknologi budi daya sehingga dapat meningkatkan intensitas tanam. Dukungan pemerintah setempat dan instansi terkait sangat diperlukan karena masih terbatasnya peran serta dan kemampuan petani (P3A) dalam pengelolaan jaringan di tingkat tersier. Jika P3A belum mandiri maka efisiensi pemanfaatan air irigasi tidak dapat dilakukan dengan optimal, dan penerapan teknologi tidak memberikan produksi yang maksimal.

Tulisan ini membahas tentang peran, kemandirian, pola pengembangan P3A dalam mengelola air dan produktivitas padi di lahan rawa pasang surut. Keberhasilan P3A dalam mengelola air sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas lahan rawa pasang surut dan produktivitas tanaman.

II. PERANAN P3A DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI PADI

2.1. Jaringan Tata Air Lahan Rawa

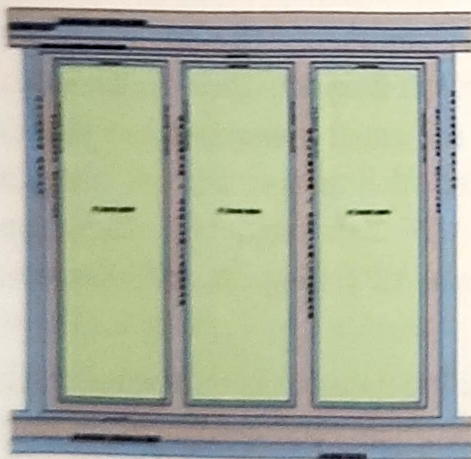
Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2010, pengelolaan air diselenggarakan pada dua tingkatan, yaitu 1) pengelolaan air di saluran tersier atau tata air mikro yaitu pengelolaan air di lahan usahatani yang menentukan secara langsung kondisi lingkungan bagi pertumbuhan tanaman, dan 2) pengelolaan air di jaringan utama (primer dan sekunder), atau tata air makro, yaitu pengelolaan air di tingkat sistem makro yang berfungsi menciptakan kondisi yang memenuhi kesesuaian bagi terlaksananya pengelolaan air di saluran tersier (tata air mikro). Metode pengelolaan air pasang di antaranya: 1) drainase untuk mengeluarkan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada jaringan reklamasi, 2) suplesi untuk memasukkan air ke dalam jaringan reklamasi, 3) pencucian untuk perbaikan kualitas lahan, dan 4) penggelontoran untuk mendorong air keluar dari jaringan reklamasi.

Di lahan rawa pasang surut, pengelolaan air di tingkat makro merupakan satuan unit pengelolaan (UPT) yang terdapat dalam satu skim sistem garpu (Kalsel dan Kalteng) dan sistem sisir di Sumatera dan Kalimantan Barat. Sistem Garpu yang dianjurkan oleh Tim Universitas Gadjah Mada (1973). Sistem ini merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari sistem rakyat (handil dan anjir) sehingga memungkinkan daerah reklamasi menjadi lebih luas. Sistem ini telah dilaksanakan di kawasan Pulau Petak, seperti UPT Barambai, UPT Belawang, UPT Sakalagun (Kalimantan Selatan), UPT Tamban Luar, UPT Pangkoh, UPT Kanamit (Kalimantan Tengah).

Sistem pengelolaan air di tingkat mikro merupakan unit pengelolaan air pada tingkat saluran tersier, kwarter, dan petak usahatani disebut Sistem Tata Air Mikro (TAM). Sistem tata air mikro dilengkapi dengan saluran kwarter, setiap satu hektar sawah terdiri dari dua buah surjan dan tiga petak sawah. Setiap satu hektar sawah dibuat galengan/tanggul keliling yang di bagian dalamnya dibuat saluran cacing. Antara saluran kwarter dan tersier dipisahkan oleh jalan usahatani. Sistem tata air mikro ternyata dapat mengurangi kelebihan air pada musim hujan, mengurangi keasaman tanah, dan berfungsi sebagai pelindian terhadap zat-zat beracun dengan memanfaatkan fluktuasi air pasang dan surut. Sistem tata air mikro dilakukan di UPT Danda Besar seluas 50 hektar dan UPT Tarantang II

seluas 25 hektar pada tahun 1982-1984. Kemudian adanya BANPRES tahun 1989 diperluas pada kawasan 1.000 hektar sawah tersebar di Kecamatan Barambai, Rantau Badauh, Mandastana, Belawang, dan Anjir Muara, Kalimantan Selatan. Pada tahun 2003 luas lahan sawah yang memiliki TAM seluas 5.750 hektar, luas ini terus meningkat hingga sekarang.

Tujuan TAM adalah untuk meningkatkan pencucian (*leaching*) pada lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut dengan tipologi A dan B penerapan TAM melalui sistem satu arah (STASA) dengan dilengkapi pintu *inlet* (masuk) pada saluran masuk dan pintu *outlet* (keluar) yang berbeda dalam satu unit hamparan usahatani. Melalui sistem ini proses pencucian unsur-unsur yang bersifat racun bagi tanaman dapat berlangsung dengan baik. Pintu air yang dipasang pada muara inlet dan outlet bersifat semi otomatis, membuka dan menutup memanfaatkan gerakan air pasang dan surut. Saluran tata air mikro dibangun sepanjang jalan usahatani dikombinasikan dengan saluran kuarter yang merupakan saluran batas kepemilikan lahan (Gambar 12). Sedangkan pada lahan tipologi C, saluran tersebut ditabat untuk menjaga tinggi muka air tanah dan memungkinkan air hujan tertampung dalam saluran dan petakan lahan (Noor 2014).



Gambar 12. Model penataan saluran tata air mikro (tam) di lahan rawa pasang surut (Sumber: Dokumentasi Balittra 2012)

Peran anggota P3A adalah membuka dan menutup pintu tabat sesuai dengan kebutuhan air. Jika air berlebih, maka pintu tabat dibuka, sebaliknya jika membutuhkan air, pintu tabat dipertahankan tertutup.

Beberapa hal yang membatasi pengelolaan air di lahan rawa pasang surut seperti: 1) kualitas bangunan irigasi menurun, 2) kepemilikan lahan oleh warga luar desa sehingga saluran di sekitarnya penuh gulma, 3) kapasitas sumber daya manusia, dan 4) hubungan dengan *stakeholder* masih rendah. Kondisi ini menyebabkan air irigasi tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi petani jika tidak dikelola dengan baik. (Prabowo 2015; Hutasuhut 2011). Selanjutnya, menurut Aini dan Nadida (2010) aktivitas kelembagaan petani terhadap fungsi infrastruktur baru 87,59%. Oleh karena itu, jika prasarana jaringan/saluran belum terbentuk dengan baik maka sulit meningkatkan peran kelompok P3A secara maksimal.

2.2. Produktivitas Padi Lahan Rawa

Produktivitas padi di lahan rawa berbeda dengan jenis lahan lainnya. Lahan rawa pasang surut akan memberikan produktivitas yang tinggi jika airnya dapat dikelola dengan baik. Semakin lama lahan diberokan, semakin banyak input yang dibutuhkan jika lahan tersebut dibuka kembali menjadi lahan usahatani. Produksi padi unggul di lahan rawa pasang surut berkisar antara 3-5 ton/ha dan padi lokal 2- 3 ton/ha. Peran kelompok P3A adalah mengatur air pada tingkat usahatani dan memelihara jaringan tata airnya. Salah satu komponen teknologi pada budi daya padi adalah pemberian air sesuai kebutuhan tanaman. Cara pengelolaan air di lahan pasang surut, menggunakan sistem tata air mikro yang dapat berfungsi mengatur kelebihan air di petak sawah dan menahan air saat sawah kekurangan air. Untuk hal ini peran pintu air, saluran tersier yang bersih dari rumput sangat penting. Produktivitas padi menggunakan sistem tata air mikro lebih tinggi dibandingkan dengan lahan usaha non tata air mikro (Rina dan Noorginayuwati 2000). Tabel 11 menyajikan hasil usahatani padi kelompok P3A yang dibina dan tidak dibina di lahan rawa pasang surut. Perbaikan kelembagaan P3A melalui pembinaan seperti pelatihan (manajemen dan teknologi), dapat meningkatkan kapasitas kelompok P3A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan pengelolaan air yang tepat, lahan sawah dapat ditanami dengan pola padi-padi. Produksi padi unggul pada MH di lahan rawa pasang surut yang diperoleh petani kelompok P3A yang dibina meningkat sebesar 14,3% dibandingkan produksi padi pada anggota P3A yang tidak dibina. Kenaikan produksi yang rendah hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang belum berfungsi secara optimal (Rina dan Penggabean 2014).

Tabel 11. Analisis biaya dan pendapatan usahatani padi 1 ha pada p3a dibina dan tidak dibina di lahan rawa pasang surut

No.	Uraian	Lahan Pasang Surut	
		P3A Dibina	P3A Tidak Dibina
1.	Produksi (kg/ha)	2.283	1.997
2.	Penerimaan (Rp/ha)	10.273.500	8.986.500
3.	Biaya Total (Rp/ha)	5.198.987	5.551.518
4.	Keuntungan (Rp)	5.075.398	3.434.982
5.	R/C	1,976	1,62

Sumber: Rina dan Panggabean (2014), diolah

Perkembangan kelembagaan kelompok P3A di lahan rawa pasang surut sangat ditentukan oleh sikap petani dalam menerima perubahan dan kesiapan serta kemauan petani untuk maju ke arah lebih baik. Semakin terbuka petani dalam menerima teknologi baru, maka semakin memudahkan kelembagaan berperan secara efektif (Cahyono *et al.* 2013: Kholil *et al.* 2018). Jadi, besar kecilnya kontribusi kelompok P3A dalam pengelolaan air di lahan rawa pasang surut lebih ditentukan aktif tidaknya kelompok tani/gabungan kelompok tani dalam menerapkan teknologi budi daya sehingga dapat meningkatkan intensitas tanam.

III. KEMANDIRIAN KELOMPOK P3A

Kemandirian petani bermula dari kemampuan petani dalam melakukan kegiatan. Kemandirian dan keswadayaan individu dapat terwujud melalui proses-proses sosial dalam kelembagaan yang ada di masyarakat (Christenson dan Robinson 1989). Adanya interaksi yang dibangun antarmasyarakat diharapkan menjadi proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kapasitas individu. Seperti yang dikemukakan Bunch (1991) bahwa kapasitas petani dapat diperoleh melalui pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan penting bagi masyarakat karena: 1) banyak masalah pertanian yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga petani, 2) organisasi masyarakat memberikan keberlanjutan pada usaha-usaha untuk menyebarkan dan mengembangkan teknologi, atau pengetahuan teknis kepada masyarakat, dan 3) untuk menyiapkan masyarakat agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi yang terbuka.

Terkait dengan kemandirian kelompok P3A, maka suatu kelompok P3A yang mandiri harus memiliki syarat-syarat, antara lain: 1) organisasi (memiliki AD/ART, berbadan hukum, memiliki nomor rekening dan tertib administrasi), 2) aspek teknis irigasi (memiliki jaringan tata air yang berfungsi, membuat rencana tanam, adil pembagian air, berpartisipasi dalam pengelolaan sistem jaringan primer dan sekunder), 3) aspek teknis pertanian (meningkatkan intensitas tanam, hasil diperoleh merata dan dapat mengatur air dengan baik (TAM)), 4) aspek keuangan (terwujudnya kelompok P3A yang dapat menghimpun dana minimal 50% dari kebutuhan O & P jaringan primer dan sekunder, menggerakkan anggota sebesar 70% untuk kontribusi dan memiliki usaha ekonomi, dan 5) aspek peran pemerintah (adanya pemberdayaan bentuk pelatihan, penyuluhan dan pendampingan sesuai kebutuhan P3A, GP3A dan IP3A, adanya alokasi dana untuk pemberdayaan tersebut).

Kemandirian kelompok P3A di lahan rawa pasang surut masih belum mandiri. Berbagai hal sebagai penyebabnya antara lain: 1) masih lemahnya manajemen dan belum memiliki dana sendiri sehingga sulit untuk melaksanakan kegiatan, 2) kelembagaan pengelolaan air P3A di lahan rawa pasang surut belum efektif dalam melakukan perannya, dan 3) titik terlemah kelompok P3A yang ada di lahan rawa pasang surut adalah tidak berjalannya fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan kegiatan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian kelompok P3A yang dibina memiliki skor lebih tinggi dibandingkan kelompok P3A yang tidak dibina pada aspek organisasi, keuangan, operasionalisasi dan pemeliharaan dan penerapan teknologi (Rina dan Panggabean 2014). Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan kapasitas kelembagaan P3A harus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Hal ini sesuai dengan Permentan No. 79/Permentan/07.140/12/2012 bahwa untuk pembinaan P3A dan Pemberdayaan P3A, diperlukan langkah-langkah dan kegiatan dari kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian P3A dalam upaya peningkatan produksi pertanian. Pembinaan dan Pemberdayaan P3A difokuskan kepada pemberdayaan organisasi/lembaga dan sumber daya manusianya. Menurut Pratiwi *et al.* (2012) bahwa kelembagaan yang mandiri harus memiliki indikator: 1) pengetahuan (*knowledge*), 2) kemampuan (*capacity*), dan 3) kepercayaan (*trust*) dan adanya partisipasi.

Untuk mencapai kelompok P3A yang mandiri diperlukan pemberdayaan dan penguatan P3A.

Pembinaan dan pemberdayaan P3A tidak terlepas dari perwujudan terlaksananya fungsi dasar P3A, yaitu a) mendistribusikan air irigasi secara adil dan efisien, b) mengelola konflik yang terjadi antara pemakai air secara adil, dan c) memelihara jaringan irigasi tersier/tingkat usahatani baik irigasi teknis maupun irigasi desa secara bersinambungan. Oleh karena itu, kerja sama peneliti, penyuluh, juru air dan aparat desa dan fasilitasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian setempat dalam penguatan kemandirian P3A sangat dibutuhkan. Rina (2017) menyebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan kemandirian P3A antara lain:

1. Aspek Kelembagaan
 - a. Membina organisasi kelompok P3A agar memiliki hukum yang jelas.
 - b. Melakukan penguatan manajemen P3A terutama untuk meningkatkan kemampuan manajerial melalui pelatihan, studi banding pada kelompok P3A yang berhasil.
 - c. Mendampingi kelompok P3A dalam pembuatan AD/ART yang memuat tentang kegiatan, pertemuan, besar iuran dan sebagainya.
 - d. Mendampingi/membina kelompok P3A dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi P3A.
2. Aspek Teknis
 - a. Melakukan peningkatan keterampilan pengurus dan anggota tentang teknis tata cara pemadatan tanah, pembacaan alat ukur debit, cara pembagian air, dan penelusuran jaringan.
 - b. Melakukan penyuluhan tentang teknologi pertanian yang direkomendasikan.
3. Aspek Keuangan
 - a. Meningkatkan keterampilan pengurus dalam hal manajemen keuangan kelompok.
 - b. Melakukan pendampingan dan fasilitasi kerja sama P3A dengan pihak lain.

4. Aspek Kerja Sama
 - a. Membantu P3A untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk sesuatu usaha yang dapat dilakukan agar memperoleh tambahan dana kas kelompok seperti pembelian sarana produksi secara berkelompok pada koperasi.
 - b. Membimbing P3A melaksanakan usaha kelompok seperti perbenihan, peternakan, dan sebagainya.
 - c. Melakukan integrasi kegiatan teknis secara sinergi antara kelompok tani dan kelompok P3A. Kegiatan pengelolaan air termasuk dalam sub kegiatan kelompok tani karena anggota petani juga merupakan anggota P3A.
5. Aspek Peran Pemerintah
 - a. Melakukan pembinaan secara terintegrasi dari instansi terkait agar lebih efisien seperti pelatihan dapat dilakukan secara bersama.
 - b. Memberikan informasi yang jelas dan tegas kepada P3A seperti pemberian dana untuk pemberian air kepada kelompok.

3.1. Efektivitas Kelompok P3A

Efektivitas kelompok P3A mempunyai pengaruh timbal balik dengan kedinamisan kelompok. Dinamika kelompok P3A dapat dilihat dari unsur-unsur seperti tujuan, struktur, fungsi, dan tugas kelompok. Kekompakan, pengembangan dan pemeliharaan, suasana dan desakan kelompok. Dengan memerhatikan ketujuh unsur tersebut dapat diketahui efektivitas kelompok P3A dalam mencapai tujuannya. Hal yang sama terjadi pada hasil penelitian Rina (2015) mengatakan bahwa dinamika kelompok P3A dapat lebih dinamis dengan meningkatkan perilaku kepemimpinan kelompok, sedangkan efektivitas kelompok dapat ditingkatkan dengan cara mendinamiskan kelompok P3A.

Hasil penelitian Rina dan Panggabean (2014) mengemukakan bahwa keefektivan kelompok dapat diukur dengan melihat capaian tujuan kelompok melalui kepuasan anggota setelah tujuan tersebut tercapai. Tujuan kelompok adalah meningkatkan produktivitas padi yang dihasilkan karena adanya pengelolaan air. Anggota akan merasa bangga dengan kelompok P3A-nya kalau hasil padinya meningkat. Hasil skor efektivitas kelompok P3A lahan pasang surut kelompok P3A yang dibina lebih efektif

dibandingkan kelompok yang tidak dibina. Keadaan ini dapat dimengerti karena secara teknis anggota kelompok P3A yang melakukan pengelolaan airnya akan memperoleh produksi lebih tinggi. Kegiatan usahatani terlaksana bilamana kegiatan P3A bersinergi dengan kegiatan kelompok tani yang dinamis, seperti pengaturan air dan gotong royong membersihkan saluran tersier maupun kuarter.

IV. POLA PENGEMBANGAN KELOMPOK P3A

Arah pengembangan kelompok P3A adalah mewujudkan P3A yang mandiri dan mampu memanfaatkan sumber daya air untuk mengembangkan usahatani secara efektif dan efisien sehingga tercapai kehidupan petani yang sejahtera. Seperti diketahui bahwa kelompok P3A di lahan rawa pasang surut belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini disebabkan karena pembinaan dari instansi terkait terhadap kelompok P3A masih belum maksimal dan belum memiliki dana secara khusus. Peran P3A cukup penting selain mengatur air di lahan sawah, juga memelihara saluran tersier yang dapat dilakukan secara berkelompok dan menerapkan teknologi budi daya. Eksistensi kelembagaan P3A dalam mengelola teknologi harus didukung partisipasi, pendampingan dan kemudahan akses (Kusdaryanto 2013). Rendahnya partisipasi petani dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tidak selalu disebabkan manajemen yang lemah dalam organisasi, tetapi juga disebabkan oleh faktor intern petani. Tingkat partisipasi petani berkaitan dengan kemampuan diri serta perhitungan untung-rugi. Kemampuan petani sesuai dengan keadaan yang melekat pada diri petani (Zakaria 2010). Oleh karena itu, dalam mengembangkan kelompok P3A di lahan rawa pasang surut banyak hal yang harus diperhatikan baik faktor internal maupun eksternal.

Selanjutnya, Nasrul (2012) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu kelembagaan petani agar tetap eksis dan berkelanjutan adalah:

- (1) Prinsip otonomi (spesifik lokasi) terdiri atas dua bagian, yaitu *Pertama*, Prinsip otonomi adalah mengacu pada individu sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia. *Kedua*, Otonomi desa (spesifik lokasi) yaitu pengembangan kelembagaan disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri (spesifik lokal). Misalnya, kelembagaan P3A di lahan rawa pasang surut semua aturan hukum

yang berlaku memerlukan penyesuaian sehingga peluang bagi setiap masyarakat untuk bertindak sebagai subjek, juga harus memerhatikan sistem nilai yang berlaku di lahan rawa.

- (2) Prinsip pemberdayaan. Pemberdayaan mengusahakan agar kelompok P3A dapat mengawasi kehidupan mereka sendiri dan menyiapkan ke depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan kelompok P3A adalah usaha untuk mencapai agar kelompok P3A memiliki kemandirian.
- (3) Prinsip kemandirian lokal. Kegagalan pengembangan kelembagaan selama ini salah satunya karena tidak melibatkan kelembagaan lokal yang ada di pedesaan. Menurut Saptana *et al.* (2003) bahwa ciri kelembagaan tradisional adalah sedikit kelembagaan, namun banyak fungsi sedangkan pada masyarakat modern yang dicirikan banyaknya kelembagaan dengan fungsi-fungsi spesifik dan sempit. Kemandirian lokal mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat seperti yang terjadi saat ini (Amien 2005).

Tahapan-tahapan kegiatan dalam pengembangan kelembagaan kelompok P3A adalah:

1. Mengidentifikasi para pelaku yang terlibat dalam pengembangan kelompok P3A, yaitu petani, PPL, juru air, kelembagaan lokal, pihak swasta, pihak pemerintah yang terkait dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan sebagainya.
2. Melakukan dialog dengan para pelaku tersebut tentang format kelembagaan P3A yang akan dibentuk. Pembentukan harus mengacu pada kelembagaan lokal yang ada di lahan rawa pasang surut.
3. Mendorong para pelaku untuk membentuk kelembagaan P3A yang sesuai dengan format yang sudah disepakati.
4. Melakukan peningkatan kapasitas para pengurus kelembagaan kelompok P3A untuk menyusun dan menetapkan rencana kerja.
5. Melakukan peningkatan dukungan penyuluhan oleh PPL dan Juru Air. Hal perlu yang dilakukan: peningkatan kompetensi penyuluh dan juru air, penguasaan materi dan kemampuan berkomunikasi dengan metode yang sesuai dengan lahan rawa, petugas memiliki program kerja yang jelas.

6. Meningkatkan kapasitas anggota kelompok P3A melalui, fasilitasi dalam kegiatan agribisnis, fasilitasi penyediaan sarana kegiatan agribisnis, menyediakan sumber-sumber belajar termasuk bimbingan teknologi, karya wisata, dan wira usaha.
7. Meningkatkan partisipasi anggota kelompok P3A dalam kelompok P3A melalui penumbuhan pemahaman terhadap masalah lahan rawa dan kegiatan yang perlu dilakukan, menumbuhkan kepemimpinan, menumbuhkan kerja sama, meningkatkan kemampuan berusahatani.
8. Meningkatkan keterlibatan kelompok P3A dengan pihak luar melalui fasilitasi atau menjembatani pihak kelompok P3A dengan pemerintah, swasta dan kelembagaan lain.

V. PENUTUP

Kelembagaan P3A di lahan rawa pasang surut merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan taraf hidup petani. Kelembagaan P3A harus ditempatkan sebagai sarana belajar, kerja sama dan melaksanakan produksi. Kelembagaan P3A yang mandiri akan mampu melaksanakan dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah pengembangan P3A dan berkelanjutan, yaitu a) mengidentifikasi para pelaku yang terlibat dalam pengembangan kelompok, b) melakukan dialog dengan para pelaku tersebut tentang format kelembagaan P3A yang akan dibentuk, c) mendorong para pelaku untuk membentuk kelembagaan P3A yang sesuai dengan format yang sudah disepakati, d) melakukan peningkatan kapasitas para pengurus kelembagaan kelompok P3A untuk menyusun dan menetapkan rencana kerja, e) melakukan peningkatan dukungan penyuluhan oleh PPL dan Juru Air, f) meningkatkan kapasitas anggota kelompok P3A, g) meningkatkan partisipasi anggota kelompok P3A dalam kelompok P3A, dan h) meningkatkan keterlibatan kelompok P3A dengan pihak luar melalui fasilitasi atau menjembatani pihak kelompok P3A dengan pemerintah, swasta dan kelembagaan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Y.Nur. dan Z. Nadida. 2014. "Analisis Kelembagaan Petani dalam Mendukung Keberfungsian Infrastruktur Irigasi (Studi Kasus: Daerah Irigasi Batang Anai, Sumatera Barat)". *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum* 6(3): 193 - 201.
- Amien, M. 2005. *Kemandirian Lokal*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Bunch, Roland. 1991. *Dua Tongkol Jagung: Pedoman Pengembangan Pertanian Berpangkal pada Rakyat*. Terjemahan oleh Ilyo Moeliono. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Cahyono., S. Tjokropandojo, dan S. Dewi. 2013. *Peran Kelembagaan dalam Mendukung Keberlanjutan Pertanian Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Lokal*. Perencanaan Wilayah Kota B. SAPPK Vol. 2 No. 1. ITB. Bandung.
- Kusdariyanto, I. 2013. "Model Kelembagaan Pengelolaan Teknologi Mikrohidro Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)". *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum* 5(1):1-18.
- Kholil, E., S. H. Sutjahyo, H. Soekarto. 2008. "Pengembangan Sampak Kota dengan Metode ISM. Studi Kasus Jakarta Selatan". *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, 1 April 2008 Hal 31-48. Bogor.
- Lopa T, Maricar F. 2013. Kajian Proses Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Yang Berwawasan Lingkungan. Makalah disajikan pada Konferensi Nasional Teknik Sipil. Universitas Sebelas Maret tanggal 24-26 Oktober 2013.
- Hutasuhut, F. E. 2011. "Peranan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Di Daerah Irigasi Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang". Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Noor, M. 2014. Inovasi Teknologi Pengelolaan Air dalam Menunjang Optimalisasi Lahan dan Intensifikasi Pertanian di Lahan Rawa Pasang Surut. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Kesuburan dan Biologi Tanah. Badan Litbang Pertanian. Kementan, Bogor 14 Agustus 2014. 67 hlm.
- Pratiwi, N. L., Betty. R., R. Hargono dan N.E.Widya. 2012. "Kemandirian Masyarakat dalam Perilaku Pencegahan Penularan Penyakit TB". *Paru. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Volume* 15(2):162-169.

- Prabowo, A. 2015. "Karakteristik dan Peranan Lembaga Petani Pemakai Air dalam Mendukung Produktivitas Hasil Padi di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan". *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* Volume 11 (3) : 271-285. Biro Penerbit Planologi UNDIP.
- Purwanto., Mat Syukur, dan Pudji Santosa. 2007. "Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Jawa Timur". *Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur*.
- Putri, R. dan R. Pamekas. 2011. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengoptimalan Teknologi Kincir Air di Sumatera Barat. <http://www.pdf-archive.com/2011/03/16/31-ratih-putri-r-r-pamekas/31-ratih-putri-r-r-pamekas.pdf>, 15 April 2011.
- Rina, Y., dan Noorginayuwati. 2000. Pengaruh Perbaikan Tata Air Mikro dan Persepsi Petani dalam Usahatani Tanaman Padi di Lahan Pasang Surut. Makalah disajikan padam Seminar Hasil Penelitian Balai Penelitian Tanaman Pangan Lahan Rawa, tanggal 4-5 Juli 2000. Banjarbaru.
- Rina Y, Noorginayuwati, Noor M., Saragih S., Umar S. 2012. Model Kelembagaan (*Action Research*) Pengelolaan Air P3A di Lahan Rawa Pasang Surut. Laporan Akhir Tahun 2012. Balittra. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan.
- Rina, Y. 2012. Dinamika Kelompok Persatuan Petani Pemakai Air di Lahan Rawa Pasang Surut. *Dalam* S. Subari, M. Effendi, S. Suryawati, *et al.* (Ed.). *Prosiding Seminar Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi*. Hal 272-279. Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, 27 Juni 2012.
- Rina, Y. dan E.W. Panggabean. 2014. "Penguatan Manajemen Mendorong Kemandirian Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Pasang Surut di Kalimantan Selatan". *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum* Volume 6(3): 141-155.
- Rina, Y., M. Alwi dan K. Anwar. 2017. Teknologi Optimasi Pemanfaatan Lahan Rawa Lebak Tengah untuk Peningkatan Pendapatan Petani. *Dalam* B.A. Bakar, *et al.* (Penyunting). *Prosiding Seminar Nasional Sinergi dan Sinkronisasi Program Litkaji dan Diseminasi Mendukung Pencapaian Swasembada Pangan*. Hlm. 818-826. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

- Saptana, T. Pranadji; Syahyuti dan Roosganda, E. M. 2003. Transformasi Kelembagaan untuk mendukung Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan. Laporan Penelitian Pusat Sosial Ekonomi. Bogor.
- Taylor, D.R.F., dan McKenzie. 1992. Development from Wihins Rontledge. Chapter 1 dan 10. London.
- Zakaria, K. Amar. 2010. "Program Pengembangan Agribisnis Kedelai dalam Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan* 29(4):147-153.